

ANALISIS DEEP ECOLOGY ARNE NAESS TERHADAP PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA UNTUK MELINDUNGI EKOSISTEM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Najwa Adhwa Ramadhani¹, Bella Ola Shakira², Tias Rahma Dewi³, Dhea Kamila Nur Jamal⁴, Mutiara Aisyah⁵, Irgi Fahrezi Hidayat⁶, Deni Angela⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan dan menghilangkan Jawasentris. Kalimantan Timur terpilih menjadi kawasan untuk pembangunan Ibu Kota baru karena termasuk wilayah yang strategis dan letaknya yang tepat untuk membangun sentral pemerintahan yang baru dan berkelanjutan. Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia yang terkenal akan hutannya yang membentang luas serta didalamnya terdapat flora dan fauna endemik. Pembangunan ibu kota ini menimbulkan permasalahan baru karena merusak lingkungan akibat deforestasi terhadap hutan. Hal ini menjadi fokus utama peneliti karena dalam implementasi pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, pemerintah kurang memerhatikan aspek keseimbangan antara kepentingan manusia dengan alam. Deep Ecology menekankan seluruh makhluk hidup memiliki nilai dan hak yang sama untuk dihargai terlepas alam mempunyai manfaat bagi manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep Deep Ecology Arne Naess terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis sumber data sekunder yaitu studi pustaka dari literatur mengenai Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip Deep Ecology dapat memberikan panduan dalam merancang pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi Deep Ecology dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mencapai keseimbangan antara manusia dan alam.

Kata kunci: Deep Ecology, Ekosistem, Ibu Kota Nusantara, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

The development of Ibu Kota Nusantara is an effort by the Indonesian government to reduce inequality and eliminate Jawasentris. East Kalimantan was chosen as the area for the construction of the new capital city because it is a strategic area and is well located to build a new and sustainable government center. Kalimantan as one of the lungs of the world is famous for its vast forests and endemic flora and fauna. The development of this capital city raises new problems because it damages the environment due to deforestation of forests. This is the main focus of researchers because in the implementation of the development of Ibu Kota Nusantara, the government pays less attention to aspects of balance between human interests and nature. Deep Ecology emphasizes that all living things have the same value and right to be respected regardless of the benefits of nature for humans. The purpose of this research is to analyze the concept of Deep Ecology Arne Naess towards the development of Ibu Kota Nusantara to protect ecosystems and sustainable development. This research uses qualitative research methods with secondary data source analysis, namely literature study of the literature on Ibu Kota Nusantara. This research shows that the application of Deep Ecology principles can provide guidance in designing development that is more environmentally friendly. This research concludes that the integration of Deep Ecology in the development of Ibu Kota Nusantara is needed to achieve a balance between humans and nature.

Keywords: Deep Ecology, Ecosystem, Ibu Kota Nusantara, Sustainable Development

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan memiliki lima pulau besar, serta belasan ribu pulau lainnya, membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sejak tahun 1945, Jakarta yang terletak di pulau Jawa ini telah diakui sebagai ibukota negara Indonesia. Berbagai perkembangan terus dilakukan di Ibu Kota Jakarta sehingga menjadikan Jakarta sebagai posisi sentral Indonesia. Mulai dari pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur, serta program dengan upaya memajukan lainnya yang membuat Jakarta tidak tertinggal dalam berbagai aspek. Namun, ketidakmerataan pembangunan di pulau lainnya yang menyebabkan ketertinggalan yang dalam hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara. Wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan sebenarnya bukan suatu ide yang baru, karena tahun 1950-an Presiden Soekarno telah memiliki keinginan untuk melakukan pemindahan ibu kota Indonesia yaitu kota Jakarta ke kota Palangkaraya yang berada di provinsi Kalimantan Tengah juga posisi Kalimantan yang strategis berada di tengah Indonesia. Presiden Soekarno juga ingin menghilangkan sentralistik Jawa dan membangun sebuah ibukota yang bukan peninggalan dari penjajah, karena menurutnya Jakarta dan Jawa adalah peninggalan dari penjajahan Belanda. Maka dari itu pada tahun 2019, Presiden Jokowi memasukkan rencana pemindahan Ibu Kota ke luar pulau Jawa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah terus menyelesaikan berbagai pertimbangan sampai Ibu Kota Negara akhirnya dipindahkan pada tahun 2022. Pada 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nasional, yang kemudian ditandatangani secara sah oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022.

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan telah memunculkan banyak respons positif dan negatif, terutama dari segi sosial dan lingkungan. Dampak positif yang dapat terjadi dengan adanya pemindahan ibu kota seperti pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun pemindahan ibu kota juga menimbulkan kontroversi dari berbagai perspektif lingkungan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menghadirkan permasalahan lingkungan, pasalnya Kalimantan yang menyandang gelar sebagai paru-paru dunia karena memiliki luas hingga 40,8 hektar, selain itu Kalimantan juga merupakan pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Deforestasi hutan untuk pembangunan ibu kota negara ini sudah memasuki permasalahan yang serius,

karena menurut laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kondisi hutan di Kalimantan Timur tidak dalam kondisi yang sehat dan baik seperti sebelumnya. Deforestasi hutan pada awal perencanaan hanya membutuhkan 30% dari 256 ribu hektar, kini angka persen tersebut melonjak hingga 57% kawasan hutan yang terdeforestasi dan hanya menyisakan 43% kawasan berhutan.

Selain itu, menurut banyak ahli, penduduk Kalimantan Timur tidak siap untuk menghadapi masalah lingkungan saat ini dan masa depan. Dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan Timur, respons terhadap perubahan iklim lebih rendah. Masyarakat Kalimantan Timur tidak memiliki banyak pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan dan urbanisasi, dan diragukan apakah mereka akan mampu menangani masalah yang akan muncul di masa depan. Selain itu, para aktivis lingkungan menyatakan bahwa pemindahan ibu kota yang tergesa-gesa akan menyebabkan masalah lingkungan baru. Proyek besar-besaran pembangunan ibu kota seluas 256.142 hektar ini akan memperburuk lingkungan hidup ibu kota, menurut Walhi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Pembangunan dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan menimbulkan potensi kerusakan hutan baru. Seperti pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, pencemaran minyak, dan pengeboran tambang mencemari air tanah sehingga menghambat jalur logistik masyarakat adalah sumber kerusakan tambahan. Jika pemindahan ibu kota dilakukan, hal itu akan berdampak pada lingkungan Pulau Kalimantan. Penebangan liar, budidaya kelapa sawit, dan kegiatan industri yang sebelumnya telah menyebabkan kerusakan alam di kawasan hutan Kalimantan, kondisinya akan semakin parah jika pembangunan ibu kota negara tidak direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh.

Literatur yang membahas mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah banyak ditemukan dalam berbagai referensi. Jurnal penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara” yang dilakukan oleh Rahmah dan Yusa Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Jatinangor pada tahun 2022 menjadi referensi utama dalam pembuatan artikel ini. Tujuan Rahmah dan Yusa mempublikasi jurnal penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak dan peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan akibat pemindahan Ibu Kota Negara. Sedangkan pada artikel ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis secara kritis mengenai konsep rencana pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara ke wilayah Kalimantan

Timur dengan mengambil perspektif Deep Ecology yang dikemukakan oleh Arne Naess. Penelitian ini sangat diperlukan guna memberikan kritik bagi pemerintah untuk meninjau ulang pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara yang dianggap masih menonjolkan sikap antroposentrisme serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ekosentrisme untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan di daerah Ibu Kota Nusantara. Selain itu, peneliti juga sudah membuat rumusan masalah guna memudahkan peneliti mencari data-data dan menjawab penelitian yakni: bagaimana analisis konsep Deep Ecology Arne Naess terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan?

B. KERANGKA KONSEP

Teori ekologi yang dikenal sebagai “Deep Ecology” menganjurkan rekonstruksi peradaban yang dramatis untuk mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan, dengan mengakui nilai intrinsik dari semua makhluk hidup dan alam. Hal ini menyoroti keterkaitan antara semua makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan non-manusia, serta pentingnya melindungi ekosistem alami dan keanekaragaman hayati. Para ahli lingkungan berpendapat bahwa pandangan dunia yang terbatas dan pola pikir yang berpusat pada manusia yang terus memprioritaskan kepentingan manusia di atas kebutuhan entitas lain secara keseluruhan adalah penyebab masalah lingkungan saat ini, seperti degradasi habitat dan perubahan iklim. Mereka menuntut perubahan ke cara pandang yang lebih berfokus pada lingkungan dan holistik, yang mengakui nilai yang melekat pada semua makhluk hidup dan ekosistem. (Ohoiwutun, 2020)

Dalam hal ini, Deep Ecology berperan sebagai etika lingkungan yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat dan sangat membantu dalam memperlakukan alam dengan hormat dan menempatkan hak-haknya setara dengan hak asasi manusia. Ekologi mendalam menekankan betapa pentingnya memperlakukan alam dengan hormat dan menjaga hubungan yang lebih baik dengannya dengan belajar lebih banyak tentang bagaimana manusia dan alam berinteraksi (Ohoiwutun, 2021).

Komponen penting dari Deep Ecology adalah tindakan, spiritualitas, dan emosi. Hubungan dengan sesuatu yang lebih besar-dalam hal ini, alam semesta-ditekankan oleh spiritualisme. Karena ukuran kita yang terbatas, kita harus menghormati hak-hak alam. Konsep, pemikiran, aspirasi, dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi bagaimana orang

berperilaku dan berpakaian dalam hubungannya dengan alam. Menurut teori ini, manusia dibagi menjadi dua kategori: mereka yang menjadi bagian dari alam dan mereka yang tidak. Akibatnya, sangat mudah untuk melakukan tindakan degradasi lingkungan yang tidak menimbulkan ancaman bagi individu manusia. Ekologi mendalam terbatas pada metodologi yang mencakup semua yang meneliti tantangan lingkungan global dan membangun hubungan antara konsep, emosi, spiritualitas, dan perilaku. Hal ini akan berdampak signifikan pada langkah-langkah yang diambil orang untuk mengembangkan pemahaman mendalam yang memandang lingkungan bukan sebagai komponen penting dalam kehidupan manusia. (Nanlohy, 2016)

Dua teori yang membentuk etika Deep Ecology membahas kaitan status alam dengan lingkungan, kedua teori tersebut adalah teori biosentrisme dan teori ekosentrisme. Teori biosentrisme menyoroti pentingnya nilai manusia yang memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan alam, menekankan keseriusan permasalahan yang ada pada makhluk hidup di alam semesta. Sedangkan teori ekosentrisme menekankan keberlanjutan dari biosentrisme, teori ini menyoroti pentingnya masalah yang dihadapi semua makhluk hidup di alam semesta. Keberlanjutan biosentrisme yang mencakup semua komunitas lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berhubungan ditekankan oleh gagasan biosentrisme. Oleh karena itu, teori biosentrisme kehidupan manusia itu berharga karena kehidupan intrinsik yang berharga. Namun, kewajiban moral teori ekosentrisme meluas ke semua realitas ekologis, bukan hanya makhluk hidup. Etika Deep Ecology dengan dasar dua teori ini dapat diakui sebagai etika lingkungan yang memprioritaskan prinsip-prinsip alam. (Satmaidi, 2017)

Pandangan filosofis terhadap konsep Deep Ecology beragam dan mencerminkan berbagai perspektif dalam memahami dan mengelola lingkungan. Para pendukung Deep Ecology berpendapat bahwa semua makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang, dan bahwa manusia tidak memiliki keunggulan atas alam. Mereka menekankan nilai intrinsik dari semua makhluk hidup, bukan hanya manfaat yang menguntungkan manusia, mereka menekankan pentingnya penilaian ekosistem dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengajak manusia untuk melihat dirinya sebagai bagian integral dari alam, bukan sebagai entitas yang terpisah atau superior. Prinsip-prinsip Deep Ecology menuntut perubahan mendasar dalam nilai dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Ini mencakup adopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung pelestarian

keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Pendukung Deep Ecology percaya bahwa hanya dengan mengakui nilai intrinsik alam, manusia dapat mencapai hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Terlepas dari banyaknya pendukung, Deep Ecology juga menghadapi kritik dari berbagai sudut pandang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pemikiran terlalu radikal dan tidak realistis. Mereka berargumen bahwa Deep Ecology cenderung idealistis dan sulit diterapkan dalam praktik. Mengubah nilai dan perilaku manusia secara mendasar adalah tugas yang sangat menantang, terutama ketika harus berhadapan dengan struktur ekonomi dan politik yang ada. Beberapa ahli berpendapat bahwa solusi praktis untuk masalah lingkungan harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan manusia dan konservasi alam. Mereka mendorong pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada solusi teknis yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek untuk mengurangi dampak lingkungan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus menganalisis pembangunan ibu kota negara dengan menggunakan perspektif Deep Ecology. Penelitian ini merupakan penelitian filsafat dengan jenis penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian eksplanatif merupakan sebuah metode penelitian yang menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Dengan penelitian eksplanasi ini, peneliti akan menjelaskan konsep pemikiran Deep Ecology dari Arne Naess dan bagaimana pemikiran tersebut diimplementasikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yakni dengan metode penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka yang diadopsi oleh peneliti untuk penelitian ini berupa mencari dan menggali lebih dalam mengenai konsep-konsep pemikiran Deep Ecology Arne Naess, pembangunan IKN, serta dampak dan upaya dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kalimantan. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui berbagai platform yang dapat diakses lewat internet seperti berita terkini, jurnal, artikel, dan *e-book* untuk memperluas wawasan dan mempermudah peneliti dalam mencari data informasi. Selain itu, dalam melakukan penelitian pustaka ini, peneliti juga berupaya mencari hasil penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti serta untuk menentukan fokus penelitian yang berbeda

pada topik serupa. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menelaah, menganalisis, dan mencatat poin penting dari hasil membaca sumber-sumber tempat memperoleh data. Setelah dilakukannya pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis hasil data yang terkumpul untuk memperoleh kesimpulan tentang masalah lingkungan pada pembangunan ibu kota melalui perspektif Deep Ecology Arne Naess.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Deep Ecology Arne Naess

Permasalahan yang terjadi akibat pemindahan Ibu Kota Negara dapat dianalisis dan dikaitkan dengan konsep Deep Ecology yang disebut sebagai sikap dan keyakinan yang sama untuk mendukung kehidupan yang harmonis dengan alam melalui upaya pelestarian lingkungan hidup. Deep Ecology merupakan sebuah gerakan yang secara fundamental menuntut perubahan cara pandang nilai dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya memusatkan tujuan jangka pendek melainkan tujuan jangka panjang. Pemikiran Deep Ecology digagas oleh salah satu tokoh, bernama Arne Naess. Arne Dekke Eide Naess, adalah seorang filsuf terkemuka yang lahir pada 27 Januari 1912 di Holmenkollen, Norwegia. Beliau sudah tertarik dengan filsafat sejak berada di bangku SMA, hingga melanjutkan minatnya dengan belajar filsafat di Universitas Oslo dan di Jerman sebelum menjadi profesor filsafat di beberapa universitas terkemuka di dunia. Naess dikenal sebagai seorang intelektual yang visioner dalam menyadarkan pentingnya menjaga lingkungan bagi keberlangsungan hidup manusia. Karya-karyanya tidak hanya memengaruhi pemikiran filsafat, tetapi juga memengaruhi kebijakan lingkungan hidup di tingkat global. Selain sebagai filsuf, ia juga terlibat aktif dalam politik melalui Partai Hijau Norwegia, gerakan perdamaian dan gerakan anti-nuklir. Karena sejak awal karirnya, Naess memang dikenal bukan hanya sebagai pemikir tetapi juga seorang aktivis. Contohnya, ia aktif terlibat dalam berbagai gerakan demonstrasi untuk perlindungan lingkungan hidup dan memperjuangkan kebijakan lingkungan yang lebih baik, terutama pada tahun 1970-an ketika kesadaran akan isu lingkungan mulai meningkat secara global. Dengan perannya sebagai seorang filsuf dan aktivis, Arne Naess membawa kontribusi yang berharga dalam upaya untuk memperjuangkan lingkungan hidup di Norwegia dan dunia.

Sejumlah karya Arne Naess dalam bidang politik lingkungan menyoroti peran pentingnya dalam mengembangkan dan mempromosikan pemikiran Deep Ecology. Salah satu karya Arne Naess yang merefleksikan pandangan tentang lingkungan adalah bukunya yang berjudul “*Ecology, Community, and Lifestyle*”. Pada buku tersebut, ia memberikan pandangannya tentang nilai intrinsik alam dan hubungan manusia dengan alam. Menurutnya, semua makhluk hidup adalah bagian dari kesatuan. Pada tahun 1973, Naess memperkenalkan konsep “Deep Ecology” melalui artikelnya yang berjudul “*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary*”. Artikel ini adalah salah satu tulisan paling terkenal dari Arne Naess yang menjelaskan perbedaan mendasar antara dua pendekatan terhadap ekologi, yaitu pendekatan ekologi dangkal (Shallow Ecology) dan ekologi mendalam (Deep Ecology). Ekologi dangkal berfokus pada perlindungan lingkungan dalam konteks manfaat langsung bagi manusia (Naess, 2017). Pendekatan ini cenderung bersifat jangka pendek dan teknis, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Menurut Arne Naess, ekologi dangkal merupakan cara pandang manusia modern yang antroposentris, karena mengupayakan berbagai pelestarian alam hanya untuk kepentingan manusia semata. Sebaliknya, ekologi mendalam menekankan nilai intrinsik alam dan perubahan fundamental dalam hubungan antara manusia dengan alam, yang menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk berkembang secara alami. Menurut Arne Naess, ekologi dalam ini merupakan cara pandang egalitarianisme ekosfer, karena menurutnya alam itu sama seperti manusia yang hidup dan bernilai pada dirinya sendiri serta saling terhubung dan memengaruhi. Artikel ini juga menguraikan prinsip-prinsip dasar ekologi mendalam dan mendorong pembaca untuk mengambil tindakan berjangka panjang dalam upaya pelestarian lingkungan. Lewat konsep ini, Naess menyatakan pandangan ekologi tentang keterkaitan antara semua bentuk kehidupan di planet. Ia berpendapat bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai dan manusia harus belajar harmonis dengan alam. Singkatnya, Deep Ecology mendorong pelestarian keanekaragaman hayati agar tercapainya keseimbangan ekosistem yang harmonis dan berjangka panjang.

Dalam hal lingkungan, Arne Naess berpandangan bahwa manusia merupakan bagian penting dari alam dan manusia dengan alam adalah satu kesatuan. Pandangan Naess tentang alam didasarkan pada lima prinsip etis. Pertama, prinsip *non-antroposentrisme*, pada prinsip ini Naess tidak menjadikan manusia sebagai fokus dalam

prinsipnya, melainkan menjadikan alam sebagai fokus utamanya. Menurutnya, manusia merupakan satu bagian dari ekosfer, jadi manusia harus berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Kedua, prinsip kesetaraan ekosfer. Secara umum dapat diketahui bahwa seluruh makhluk hidup menyandang status yang setara sebagai makhluk yang hidup di alam ini, untuk itu setiap makhluk hidup memiliki penghormatan yang setara dengan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, manusia harus menyadari akan pentingnya hak-hak alam dan tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan ekosistem. Ketiga, prinsip realisasi diri. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang sama dan setara, oleh karena itu setiap makhluk hidup memiliki hak untuk berkembang dan mengekspresikan diri sesuai dengan kodrat dirinya. Keempat, prinsip *non-violence*. Seperti yang dikemukakan Naess bahwa semua makhluk hidup adalah bagian dari kesatuan, begitupun manusia yang merupakan satu kesatuan dengan alam. Oleh karena itu, pada prinsip *non-violence* ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dalam hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini meliputi larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak dan merugikan makhluk lain karena dapat menghambat realisasi diri makhluk lain dan mengganggu harmoni ekologis. Kelima, prinsip mengakui dan menghormati kekayaan dan keanekaragaman alam dalam hubungan mutualistik. Pada prinsip ini Naess menekankan pentingnya untuk saling memengaruhi dan menguntungkan satu sama lain makhluk hidup. Dengan menghargai dan menghormati nilai yang dimiliki setiap makhluk hidup maka semua seluruh makhluk hidup akan berkontribusi bagi kekayaan dan keanekaragaman hidup (Lakonawa, 2020).

Menurut Naess, *Deep Ecology* dapat dipahami dengan dua cara pandang yang berbeda. *Pertama*, *Deep Ecology* sebagai gerakan sosial yang muncul sebagai tanggapan dari krisis ekologis. Tujuan gerakan lingkungan ini adalah untuk menolak *antroposentrisme* dan menekankan perspektif holistik, menganut prinsip kesetaraan dan keanekaragaman ekosfer, dan melawan pencemaran lingkungan untuk kepentingan alam. Hal ini sebagai bentuk melindungi bumi dengan kekayaan dan keanekaragaman yang dimiliki. *Kedua*, *Deep Ecology* sebagai ekосоfi yang dipahami dalam tiga cara yang berbeda. *Pertama*, ekologi didefinisikan sebagai kearifan tentang cara hidup yang selaras dengan kehidupan alam. Ekосоfi merupakan upaya melampaui ideologi ekologi untuk menjadi cara pandang universal yang dapat menjawab pertanyaan ekologis. *Kedua*, sebagai teori normatif yang menetapkan standar untuk perilaku dan sikap manusia terhadap makhluk alam lainnya. Ekосоfi menekankan persoalan filosofis karena

menyangkut nilai, prinsip dan norma dalam diri manusia. Ketiga, memahami dan menyelesaikan masalah ekologis secara holistik karena ekосоfi berkaitan dengan nilai, prinsip, dan norma manusia. Menurut pandangan ekосоfi, manusia harus bekerja sebagai generalis karena manusia dapat bertindak dan berpikir berdasarkan pertimbangan yang lebih luas.

Di era modern saat ini, tentu saja melahirkan banyak isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian global. Sepanjang sejarah tentu saja populasi manusia terus bertambah yang dimana hal ini dapat menjadi pemicu permasalahan lingkungan. Meskipun hidup berdampingan dengan alam, namun manusia kerap kali tidak dapat menjaga keseimbangan ekologi, mulai dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah hasil industri dan rumah tangga, deforestasi hutan yang menyebabkan satwa liar kehilangan habitatnya, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampak ekosistemnya. Namun, tidak jarang juga bahwa manusia mengupayakan pemulihan dari permasalahan lingkungan yang mereka timbulkan, tetapi terkadang manusia melakukan pemulihan ini hanya untuk kepentingannya semata bukan karena rasa menghargai dan menghormati alam. Arne Naess sebagai seorang pemikir politik lingkungan era kontemporer yang mengusung konsep *Deep Ecology* menekankan pada karya-karyanya bahwa pentingnya mengubah pola pikir manusia dari antroposentrisme menjadi ekosentrisme. Pemikiran ini mengubah pola pikir yang menjadikan manusia sebagai pusat atau prioritas dari seluruh makhluk hidup yang ada, menjadi pola pikir yang memukul ratakan semua hak yang dimiliki makhluk hidup dan menghormati semua bentuk kehidupan yang ada.

Aktivitas dan Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pemerintah sedang mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai sebuah kota baru yang mengusung konsep ramah lingkungan dan kota pintar. Untuk mewujudkan kota hutan yang berkelanjutan ini, strategi pembangunan dirancang dengan fokus pada pelestarian lingkungan serta penerapan teknologi hijau. Strategi tersebut mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan kota memperhatikan pelestarian lingkungan dan mengintegrasikan teknologi hijau. Melalui pendekatan ini, IKN diharapkan menjadi model kota masa depan yang tidak hanya modern dan maju secara teknologi, tetapi juga harmonis dengan alam dan memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi Kabupaten warganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya ke wilayah Penajam Paser. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyatakan bahwa ada sejumlah keadaan mendesak yang membutuhkan pemindahan ibukota negara. Salah satunya adalah keadaan di Jakarta yang tidak lagi mampu untuk menopang penduduk. Pemindahan ini juga akan mengubah pandangan dan paradigma tentang pembangunan Jawasentris menjadi Indonesia sentris. (Choirul dalam Ana dan Dinda, 2022)

Ibukota negara yang terbaik merupakan ibukota yang akan menimbangakan segala aspek yang berada di dalam lingkungan itu seperti aspek spasial, kewilayahan, ekologis, kerawanan bencana, ketersediaan lahan, dan sebagainya. Konsep Deep Ecology dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi segala tantangan dan permasalahan lingkungan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah menggunakan konsep Forest City yang dalam hal ini mewajibkan minimal 50% ruang terbuka hijau di area Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dianggap oleh Pakar dapat merusak kawasan karena pembangunan ini dilakukan dengan cara menebang hutan. Dalam konsep Forest City, pemerintah menggunakan 70% dalam pembangunan ini untuk menjadi ruang terbuka hijau dan melakukan 30% deforestasi untuk menjadi sebuah kawasan bangunan. Dilihat dari laporan Bappenas, dinyatakan bahwa kondisi hutan di Ibu Kota Nusantara dianggap tidak baik-baik saja. Dari 256 ribu hektar, hanya 43% yang disebut sebagai hutan alami. Jika target pemerintah untuk membuat ruang terbuka hijau sebanyak 70%, pemerintah masih mempunyai beban sebanyak 30% untuk kembali dihutankan sebagai hutan yang alami.

DEFORESTASI DI IKN														
DAS DI IKN	DEFORESTASI DI DALAM DAS JAN-JUN TAHUN 2023					TOTAL	DAS DI IKN	DEFORESTASI DI DALAM DAS TAHUN 2022					TOTAL	
	TUMPANG TINDIH	HPH	HTI	KEBUN	TAMBANG/KONSESI			TUMPANG TINDIH	HPH	HTI	KEBUN	TAMBANG/KONSESI		
SELOKAPI	0,06				0,02	0,08	SAMBOJA KUALA DS	-			0,01	0,01		
SAMBOJA DS					0,12	0,12	AMBARAWANG				0,01	0,01		
SAMBOJA					0,47	0,47	SELOKAPI	0,24			0,01	0,25		
SENIPAH DS	2,57			0,04	0,00 0,46	3,07	SAMBOJA	0,13			0,07 0,44	0,65		
MAHAKAM DS	1,57				0,05 2,67	4,30	SAMBOJA KUALA	1,84		0,37	0,43	0,12 0,56	3,31	
SAMBOJA KUALA	13,88		4,39	2,61	0,13 1,31	22,32	MAHAKAM DS	0,00			0,01 0,78	0,79		
MAHAKAM	55,67		2,79	1,85	11,95 31,05	103,31	SENIPAH DS	0,75			0,04	0,98		
RIKO MANGGAR	4,71	0,43	1,33	182,84	274,58	463,89	MAHAKAM	173,19		31,85	0,09	247,50 12,68	465,32	
Total	78,47	0,43	8,51	187,33	12,15 310,67	597,56	RIKO MANGGAR	3,07	0,06	1,20	225,69	670,46	850,47	
							TOTAL	179,21	0,06	33,42	226,25	247,71	635,92	1.322,57

Gambar 1. Data Deforestasi Hutan di IKN Tahun 2022-2023 dilansir dari Forest Watch Indonesia

Dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2018 hingga 2021, aktivitas deforestasi di wilayah Penajam Paser mencapai 18 ribu hektare. Menurut catatan Forest Watch Indonesia tahun 2023 menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022 sampai Juni 2023, luas area hutan di daerah Ibu Kota Kalimantan terdeforestasi mencapai 1.663 hektare. Aktivitas deforestasi yang masif mengakibatkan banyak konsekuensi negatif termasuk kehilangan habitat flora dan fauna, erosi tanah hingga pencemaran lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Deforestasi hutan juga dapat memengaruhi aspek hutan itu sendiri sebagai pasokan air dan tanah, regulator mikroiklim untuk penggunaan sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat. Hal ini juga akan meninjau negatif terkait komitmen Indonesia di tingkat internasional yang berupaya untuk mengurangi emisi.

Indonesia adalah negara yang dihuni oleh ribuan suku yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda. Mereka saling mengakui dan menghormati hukum asli dan hak-hak tradisional mereka yang tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihargai seiring dengan kemajuan zaman dan masyarakat adat juga tercantum dalam Pasal 28I ayat (3). Selanjutnya, pasal yang mempertimbangkan Hak Atas Tanah (HAT) masyarakat dan masyarakat adat saat memberikan hak kelola dan pengadaan tanah kepada Otorita IKN yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 30 UU No. Tahun 2022. Tanah di IKN ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan mempertimbangkan HAT masyarakat adat.

Selain itu, menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan masyarakat adat diakui jika memenuhi kriteria tertentu, seperti berbentuk paguyuban, memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum adat yang jelas, pranata hukum yang ditaati, dan masih memungut hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun di mata hukum, masyarakat hukum adat dilindungi dalam konstitusi, beberapa hak masyarakat adat telah dihilangkan untuk mempercepat kemajuan dan perkembangan zaman untuk pembangunan. Oleh karena itu, untuk menjaga konstitusi dan asas keadilan, hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara harus dilindungi. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat berdasarkan berbagai undang-undang antara lain adalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan ladang dan perkebunan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan wilayah pesisir.

Selain berdampak buruk terhadap lingkungan, pembangunan IKN juga berdampak buruk dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan sekitar lokasi pembangunan. Pada aspek ekonomi, pembangunan melalui IKN tidak akan langsung terwujud dengan rentang waktu yang singkat, karena ketersediaan barang yang belum optimal dan suplai barang belum maksimal di Kalimantan Timur. Hal ini yang menjadi potensi terhambatnya pembangunan ekonomi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pembangunan IKN ini juga berdampak pada aspek sosial. Dalam pembangunan ini juga harus memerhatikan proyek pemerataan dan pengembangan pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Tujuan dari pembangunan ibukota untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya tentang menyebarkan pembangunan, namun juga tentang memperbaiki semua bagian kehidupan negara secara adil dan seimbang serta menciptakan tata pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner (Fristikawati dkk, 2022).

Analisis Kritis Deep Ecology Arne Naess Terhadap Aktivitas Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pada tahun 1974, Arne Naess mengemukakan pemikirannya mengenai pandangan beliau tentang nilai intrinsik alam dan tentang hubungan antara manusia dan alam melalui bukunya yang berjudul "*Ecology, Community and Lifestyle*". Dalam pandangannya ini Naess menyatakan bahwa semua makhluk hidup adalah bagian dari satu kesatuan. Pada pemikiran Deep Ecology ini, ia ingin mengubah pola pikir masyarakat modern antroposentris yang hanya mengupayakan pelestarian lingkungan hanya demi kepentingan manusia semata menjadi masyarakat ekosentris yang juga menyeimbangkan kepentingan alam karena setiap makhluk hidup memiliki nilai dan haknya masing masing. Dalam aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemikiran Deep Ecology menyoroti berbagai aspek untuk dianalisis seperti dampak pembangunan tersebut terhadap lingkungan, ekosistem, pembangunan berkelanjutan serta hubungan antara manusia dengan alam.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser provinsi Kalimantan Timur merupakan tantangan besar bagi negara, terutama dari segi lingkungan hidup. Proyek ambisius ini menuntut perencanaan yang sangat hati-hati dan komprehensif untuk menghindari dampak signifikan terhadap ekosistem lokal. Dalam konteks ini, konsep Deep Ecology yang dibawa dan digagas oleh Arne Naess sangat relevan. Deep Ecology

menekankan pentingnya melihat manusia bukan sebagai entitas yang terpisah dan berbeda, melainkan sebagai bagian integral dari alam. Kalimantan Timur, yang dikenal dengan kekayaan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayatinya, menghadapi risiko besar jika pembangunan IKN tidak dilakukan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip Deep Ecology mengharuskan kita untuk memperlakukan semua bentuk kehidupan dengan penghormatan yang sama, memastikan bahwa pembangunan tidak merusak keseimbangan alam yang sudah ada. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk menekankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan pelestarian lingkungan.

Langkah-langkah seperti pengelolaan limbah yang efektif, perlindungan habitat alami, serta upaya mitigasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. Selanjutnya, partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan berbagai aktor politik dalam proses perencanaan dan pembangunan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan ekologis dan sosial dapat seimbang, sejalan dengan prinsip Deep Ecology yang mengedepankan kesetaraan ekologis. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berwawasan lingkungan, yang sejalan dengan ajaran Deep Ecology Arne Naess, pembangunan IKN dapat menjadi contoh sukses dan harmoni antara kemajuan urban dan konservasi alam.

Arne Naess melihat aktivitas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui analisis Deep Ecology sebagai berikut (Khoirul, 2021).

1. *Setiap manusia dan makhluk lainnya yang hidup di alam ini memiliki nilai-nilai dan hak yang berharga pada dirinya sendiri. Nilai-nilai ini tidak bergantung pada apakah alam memiliki manfaat langsung bagi manusia atau tidak.*

Terdapat pengaruh positif dan negatif akibat aktivitas pembangunan Ibu Kota

Nusantara. Dampak positif adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan ini yaitu, pemindahan Ibu Kota Nusantara berdampak pada kesetaraan dan mengurangi ketimpangan masyarakat Kalimantan dengan kota lainnya. Dengan adanya pemindahan ini, di Kalimantan akan terjadi pemerataan pembangunan yang baik seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pendidikan akan menciptakan kualitas masyarakat Kalimantan yang lebih unggul. Hal ini nantinya membuat Kalimantan tidak tertinggal dari kota-kota lainnya. Aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga akan memberikan masyarakat Kalimantan sekitar pembangunan Ibu Kota lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dampak negatif akibat adanya aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yang berdampak negatif terhadap ekosistem tumbuhan dan habitat hewan endemik yang hidup di hutan Kalimantan.

2. *Kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan memengaruhi perwujudan nilai-nilai tersebut, serta nilai tersebut memberikan sumbangsih bagi perkembangan manusia dan makhluk lainnya di dunia.*

Dalam pembangunan IKN, penting untuk diakui bahwa kekayaan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan sumbangsih signifikan bagi keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan semua bentuk kehidupan. Prinsip-prinsip *Deep Ecology* menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menghormati dan melindungi nilai intrinsik semua bentuk kehidupan, bukan hanya yang bermanfaat langsung bagi manusia. Ini berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN harus mempertahankan dan memulihkan habitat alami, melindungi spesies yang terancam punah, dan meminimalkan dampak lingkungan.

3. *Manusia tidak memiliki hak untuk mengurangi keanekaragaman dan kekayaan alam kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan diantara kemajuan dan pelestarian lingkungan yang berada di Kalimantan apalagi dengan gelarnya yang disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Pembangunan ini harus memastikan kebutuhan vital manusia dapat terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan. Kalimantan yang dikenal sebagai hutan hujan tropis yang memiliki flora dan fauna yang sangat beragam harus dilestarikan dan menjaga habitat mereka agar tidak punah dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan konsep *Deep Ecology* yang dapat meminimalisir kerusakan ekosistem alami dan mempertahankan habitat dari makhluk

hidup lainnya dengan menerapkan ekosentrisme sebagai landasan pemikirannya. Konsep ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan yang ada di daerah Kalimantan sebagai upaya penghargaan hak-hak kepada entitas non manusia.

4. *Situasi dapat semakin memburuk karena ada campur tangan manusia dewasa ini terhadap dunia luar ini sudah sangat berlebihan.*

Prinsip-prinsip *Deep Ecology* yang diperkenalkan oleh Arne Naess menekankan pentingnya melihat manusia sebagai bagian integral dari alam dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Pembangunan IKN harus mengakui dampak besar dari intervensi manusia terhadap ekosistem lokal, termasuk kerusakan hutan, hilangnya habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Pemikiran *Deep Ecology* mengingatkan kita bahwa setiap bentuk kehidupan memiliki nilai intrinsik dan kontribusi penting bagi keseimbangan ekosistem. Untuk mengatasi masalah ini, perencanaan IKN perlu menerapkan pendekatan yang berkelanjutan, seperti perencanaan tata ruang yang mempertahankan kawasan lindung, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, untuk memastikan bahwa pembangunan mempertimbangkan kepentingan ekologis, masyarakat lokal harus terlibat dalam proses perencanaan.

5. *Diperlukan adanya perubahan kebijakan dan upaya untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara.*

Dalam perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara pemerintah telah mengadopsi beberapa prinsip sebagai upaya melindungi lingkungan dari kerusakan yang terjadi. *Pertama*, prinsip kotab spons untuk melindungi lingkungan dengan menyediakan akses minum bersih, sanitasi, dan mengurangi risiko banjir. Prinsip spons ini disertai dengan kegiatan yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Hal ini untuk memastikan perlindungan terhadap keberagaman hayati yang hidup di wilayah IKN. *Kedua*, dalam menghadapi masa depan, pemerintah menerapkan konsep *smart city* untuk pembangunan IKN. *Ketiga*, pemerintah menetapkan bahwa sistem bangunan yang digunakan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan bangunan yang ramah lingkungan yang diatur pada peraturan tertulis tentang IKN yaitu lewat UU Nomor 2 Tahun 2022. Namun, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini yaitu bahan pembangunan yang digunakan belum ramah lingkungan yang akan masih berpotensi merusak lingkungan hidup.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dalam Kacamata Lingkungan

Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987 menjadi dasar dari gagasan global tentang pembangunan berkelanjutan. Laporan Brundtland yang berjudul “Our Common Future” merupakan sumber dari gagasan ini. Menurut laporan tersebut, setiap negara harus mempraktikkan gagasan pembangunan berkelanjutan (Helmi dalam Anis & Bagus, 2022).

Konsep pembangunan berkelanjutan telah dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain: (1) Emil Salim dalam bukunya I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, yang menyatakan bahwa manusia harus mengelola alam serasional mungkin. Hal ini mendukung tesis Naess dalam bukunya Deep Ecology, yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungan harus seimbang; (2) Otto Soemarwoto dalam Helmi menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mencapai keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi; (3) Lamont C. Hempel menyatakan dalam buku I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan ke dalam kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hal ini memerlukan pendekatan pembangunan yang mengarah pada pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan, atau pembangunan lingkungan. (Anis dkk, 2022)

Dari pandangan ketiga ahli tersebut, jelas bahwa perencanaan dan prosedur pembangunan yang tepat merupakan hal yang krusial bagi gagasan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan manusia tanpa mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan, proses pembangunan ibu kota negara harus menekankan aspek-aspek yang ada, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini akan membantu mencegah deforestasi.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengadopsi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 tentang Sustainable Development Goals (SDGs), untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam resolusi ini terdapat 17 poin agenda untuk pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan untuk tahun 2030, yang berfungsi sebagai rencana aksi untuk manusia, lingkungan, dan kesejahteraan (Fristikawati, 2022). Tiga perhatian utama dari SDGs pembangunan berkelanjutan adalah (1) manusia, yang didedikasikan untuk mengakhiri kemiskinan dan memastikan bahwa setiap orang dapat mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan yang sehat; (2) planet, yaitu mencegah

degradasi lingkungan dengan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim melalui eksploitasi, produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan; dan (3) kemakmuran, yaitu menjamin bahwa setiap orang menjalani kehidupan yang sejahtera yang selaras dengan kemajuan peradaban manusia dan alam. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pembangunan ibu kota negara harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

E. KESIMPULAN

Analisis konsep Deep Ecology Arne Naess terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara menyoroti kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dasar utama dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek IKN adalah menghormati hak alam dan nilai intrinsik, serta memastikan setiap tindakan tidak merugikan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Fokus utama adalah pada perlindungan keanekaragaman hayati dengan mengambil tindakan nyata untuk merawat habitat alami dan melindungi spesies yang terancam punah di Kalimantan Timur yang kaya akan flora dan fauna.

Tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan eksploitasi berlebihan harus diatasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini melibatkan integrasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan proyek, dengan memprioritaskan perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Perubahan kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari PBB menjadi pedoman utama untuk menetapkan arah pembangunan IKN, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesehatan yang baik. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K, Jirzanah. "Analisis Deep Ecology Arne Naess Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Merapi Studi Kasus: Penambangan Pasir Merapi Di Sekitar Sungai Gendol Cangkringan Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19, No. 1 (2021): 98-106.
- Farida, Anis, And Moh Bagus. "Implementasi Paradigma Green Constitution Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Menuju Smart Forest City." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, No. 1 (2023): 104-109.
- Fristikawati, Yanti, And Nugroho Adipradana. "Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum." *Jurnal Justisia*: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7 (2022): 375.
- Fristikawati, Yanti, Rainer Alvander, And Verrence Wibowo. "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (2022): 739-749.
- Naess, Arne, And Arne Næss. *Ecology, Community And Lifestyle: Outline Of An Ecosophy*. Cambridge University Press, 1990.
- Naess, Arne. "The Three Great Movements." *The Trumpeter* 9, No. 2 (1992).
- Naess, Arne. "The Shallow And The Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary." In *The Ethics Of The Environment*, Pp. 115-120. Routledge, 2017.
- Nanlohy, Dian Felicia. "Manusia Dan Kepedulian Ekologis." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 2, No. 1 (2016): 36-55.
- Negara, Pada Pemindahan Ibu Kota. "Konsep Forest City Di Tengah Darurat Lingkungan." *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara*: 58.
- Ohoiwutun, Barnabas. "Kedudukan Dan Peran Manusia Dalam Alam: Tanggapan Atas Kritik Al Gore Terhadap Arne Naess." *Jurnal Ledalero* 20, No. 1 (2021): 67-81.
- Panggilan Etis Merawat Alam: Membaca Buku 'Posisi Dan Peran Manusia Dalam Alam Menurut Deep Ecology Arne Naess (Tanggapan Atas Kritik Al Gore)' Karya Romo Dr. Barbanas Ohoiwutun (2021, Juli 13). *Binus University*. <https://binus.ac.id/character-building/2021/07/panggilan-etis-merawat-alam-membaca-buku-posisi-dan-peran-manusia-dalam-alam-menurut-deep-ecology-arne-naess-tanggapan-atas-kritik-al-gore-karya-romo-dr-barnabas-ohoiwutun/>

Pembebasan Lahan Di Ikn: Sisa 20%, Pemilik Konsesi Yang Paling Diuntungkan? (2024, Maret 15). *Forest Watch Indonesia*. <https://fwi.or.id/lahan-konsesi-di-ikn-sisa-20-siapa-yang-diuntungkan/>

Ramadhani, Rahmah, And Yusa Djuyandi. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, No. 3 (2023): 144-152.

Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, No. 2 (2015): 192-105.

Terapkan Forest City, Ibu Kota Negara Pertahankan Ruang Terbuka Hijau Dan Tekan Environmental Footprint (2020, Februari 11). *BAPPENAS INDONESIA*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/terapkan-forest-city-ibu-kota-negara-pertahankan-ruang-terbuka-hijau-dan-tekan-environmental-footprint>